

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Informasi kinerja yang dihasilkan oleh suatu sistem pengukuran kinerja ditujukan untuk keperluan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, yaitu stakeholder internal maupun eksternal. Namun, tujuan utama pengukuran kinerja instansi adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumber daya. Sistem pengukuran kinerja menjadi tidak berguna sama sekali apabila informasi kinerja yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dalam memperbaiki pengambilan keputusan.

Pemanfaatan (utilization) informasi kinerja untuk keperluan internal tidak terlepas dari tahap adopsi ukuran kinerja dan tahap menerapkan (implementasi) informasi kinerja untuk pelaporan, alokasi anggaran dan membantu pengambilan keputusan (Julnes dan Holzer, 2001). Pengakuan terhadap kedua tahap ini diperlukan karena kesalahan mengadopsi suatu ukuran kinerja akan membuat informasi kinerja menjadi tidak valid dan tidak dapat diandalkan. Jika tidak mencerminkan kinerja sebenarnya maka informasi kinerja tidak dapat diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, serta pengalokasian anggaran.

Keputusan mengadopsi suatu ukuran kinerja memerlukan perencanaan yang matang berkaitan dengan kesiapan organisasi dan personel-personel pelaksana program untuk merencanakan ukuran kinerja, melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan data kinerja. Tahap adopsi merupakan tahap pengembangan kapasitas organisasi dalam mengembangkan ukuran kinerja dan pengambilan keputusan tentang ukuran kinerja yang akan dipakai atau diadopsi. Sedangkan tahap implementasi, hasil pengukuran dan pengumpulan data atau informasi kinerja dievaluasi dan diterapkan dalam alokasi anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan strategis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Pada kedua tahap pemanfaatan informasi kinerja, organisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan faktor-faktor rasional, yaitu ketentuan eksternal dan internal, ketersediaan sumberdaya, orientasi pada tujuan, informasi yang dapat meningkatkan keahlian, namun juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan politik, baik kelompok internal organisasi maupun kelompok eksternal serta pengaruh kultur organisasi. Dengan mengakui pengaruh faktor-faktor politik dan kultur organisasi disamping faktor-faktor rasional, maka ukuran kinerja yang dirancang dan diadopsi akan dapat dimanfaatkan dalam memperbaiki pengambilan keputusan.

Ives dan Olson (Permatasari, 2002: 42) menyatakan bahwa keberadaan sistem informasi semakin mengarah untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Keterlibatan pemakai sangat diperlukan dalam keseluruhan tahap system development live cycle (mulai tahap perencanaan, analisis, perancangan,

implementasi, dan penggunaan sistem), karena pemakai merupakan bagian integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakai dalam semua tahap tersebut merupakan suatu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakai dalam tahap perencanaan, Analisis dan perancangan, memang tidak terlalu besar, tetapi pada tahap implementasi dan penggunaan, interaksi pemakai terhadap sistem yang dibentuk sangat diperlukan. Partisipasi pemakai pada pengembangan sistem berkaitan langsung dengan penggunaan sistem dan kepuasan pemakai.

Pemanfaatan informasi ini juga digunakan dalam instansi pemerintahan. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui sarana yang digunakan. Salah satunya yaitu sarana dengan memanfaatkan perkembangan Informasi.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh faktor organisasi dan sosial kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah secara spesifik dalam penelitian ini adalah, pengaruh faktor rasional dan sosial kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Malaka.

1.3 Persoalan Penelitian

Meninjau latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah faktor rasional berpengaruh terhadap pemanfaatan informasi kinerja pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Malaka?
2. Apakah sosial kultur organisasi berpengaruh terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Malaka?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini Dilaksanakan Dengan Tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor rasional terhadap pemanfaatan informasi kinerja pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosial kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Malaka.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan bias untuk memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam mengetahui pengaruh dari faktor rasional dan sosial kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja pegawai Pemerintah Daerah kabupaten Malaka

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini digunakan peneliti untuk menyelesaikan salah satu syarat pada studi jenjang Sarjana pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Diharapkan juga dapat memperluas wawasan peneliti lain untuk dijadikan bahan referensi dan bahan untuk menambah pengetahuan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai pengaruh dari faktor rasional dan sosial kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja pegawai.